

Politik Luar Negeri RI: Kasus Rohingya

Krisis kemanusiaan Rohingya secara substantif jelas bersifat multidimensi. Krisis ini bukan sekadar menunjukkan kegagalan Pemerintah Myanmar—termasuk penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi—menyelesaikan masalah akut yang berakar panjang sejak penjajahan Inggris. Gejala ini juga mencerminkan masalah cukup serius dalam dinamika politik Myanmar. Transisi menuju demokrasi lebih substantif belum mengubah banyak lanskap politik Myanmar. Tarik-menarik politik masih berlangsung intens antara militer dan sipil.

Politisi sipil, seperti Aung San Suu Kyi, ada dalam posisi dilematis; menempuh manuver dan langkah drastis dalam berhadapan dengan militer yang masih sangat kuat atau sebaliknya, berkompromi dengan militer. Sikap terakhir inilah yang tampaknya dipilih Aung San Suu Kyi, membuatnya menjadi sasaran kecaman berbagai pihak, termasuk imbauan pencabutan Nobel Perdamaian yang dianugerahkan kepadanya.

Selain itu, para politisi sipil Myanmar juga amat mempertimbangkan sensitivitas dan sentimen warga Buddha mayoritas. Apalagi sebagian dari mereka mengalami radikalisasi di bawah pengaruh biksu radikal Ashin Wirathu. Oleh karena itu, para politisi sipil memilih berpihak kepada umat Buddhis mayoritas daripada membela atau melindungi umat agama minoritas, seperti etnis Rohingya Muslim dan etnis Karen Kristen.

Kompleksitas politik Myanmar seperti itu agaknya tidak banyak dipahami umat Islam dunia yang bersolidaritas kepada Muslim Rohingya. Karena itu, ada kalangan Muslim internasional yang menginginkan dunia Muslim bersikap lebih keras dan tegas terhadap Myanmar. Gejala atau kecenderungan seperti itu juga terlihat di Indonesia.

Ekspresi solidaritas terhadap Muslim Rohingya di Indonesia sejauh ini agaknya hanya bisa disaingi solidaritas terhadap Muslim Bosnia terkait ethnic cleansing yang dilakukan Serbia berikutan pecahnya Yugoslavia. Bahkan, ekspresi solidaritas terhadap kenestapaan bangsa Palestina beberapa tahun terakhir kelihatan "datar-datar" saja—agaknya karena penderitaan Palestina sudah begitu lama, telah menjadi biasa.

Engagement Indonesia dengan Myanmar terkait Rohingya sebenarnya tidak baru. Keterlibatan RI terutama sejak 2012 ketika eskalasi masalah Rohingya kembali meningkat. Eskalasi ini ditandai peningkatan kekerasan dan gelombang

pengungsian Rohingya dalam jumlah besar ke Banglades, India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia yang secara historis memiliki hubungan dekat dengan Myanmar menerapkan pendekatan berbeda ketimbang negara lain. Jika negara-negara lain menggunakan megaphone diplomacy atau drum diplomacy, Indonesia justru menerapkan apa yang disebut Jusuf Kalla, ketika itu Ketua Umum PMI, sebagai sarong diplomacy. "Diplomasi [kain] sarung" mencerminkan pendekatan kultural. Pendekatan ini merupakan bagian integral soft diplomacy (diplomasi lunak) berdasarkan prinsip saling menghormati, tidak mencampuri urusan rumah tangga negara lain. Namun, saat yang sama, pendekatan ini memungkinkan penyampaian pesan lebih efektif terkait kepentingan kemanusiaan bersama.

Hasilnya jelas dan konkret. Indonesia satusatunya negara yang diterima Pemerintah Myanmar menjalankan program kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. Sejak maraknya krisis Rohingya tahun 2012, berkat diplomasi RI melalui Kementerian Luar Negeri, sejumlah LSM Indonesia telah melakukan berbagai program dan kegiatan kemanusiaan, seperti bantuan pangan, obat-obatan, pembangunan sekolah, dan hunian sementara.

Pendekatan dan pencapaian Indonesia seolah lenyap begitu saja dalam gelombang "kemarahan" sebagian warga Indonesia di tengah krisis kemanusiaan Rohingya terakhir. Sebagian karena tidak tahu; sebagian lagi mengetahui, tetapi ingin memanfaatkan krisis kemanusiaan Rohingya untuk kepentingan politik mereka sendiri.

Orang-orang dan kelompok terakhir ini melakukan tekanan kuat kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi dituduh "terlalu lambat" dan "terlalu lunak". Di antara mereka juga ada yang menuntut Presiden Jokowi mengusir Duta Besar Myanmar; artinya menuju arah pemutusan hubungan diplomatik.

Namun, Presiden Jokowi tampaknya menyadari gejala ini dan dengan sigap mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan terjadinya peningkatan kekerasan di Rakhine. Presiden juga mengimbau agar kekerasan segera dihentikan. Pada saat yang sama, Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Myanmar dan Banglades.

Dalam pertemuan dengan Menlu Myanmar merangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Menlu Retno menyampaikan formula 4+1 untuk penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine. Formula itu adalah 1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; 2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; 3) memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama; serta 4) membuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Adapun plus 1-nya adalah agar Myanmar segera

mengimplementasikan rekomendasi laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Misi diplomatik Menlu Retno dipuji kalangan internasional. Memang usulan formula 4+1 mungkin tidak instan bisa dilaksanakan. Namun, formula itu dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Menlu Retno juga menegaskan kembali keterlibatan masyarakat sipil Indonesia dengan pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Sebagai negara besar, itulah peran yang telah lama diharapkan masyarakat internasional.

Azyumardi Azra,

Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.